

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Awan Y. Abdoellah, Y. R. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bappeda Provinsi Jawa Tengah (2018). *Arah Pengembangan Kawasan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah*.
- Damarik Janianton, F. T. (2013). *Manajemen Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Emelyn Novalisa, S. A. (2017, Juli 1). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Pariwisata*, 4, 151-167.
- Fitra Abdilah dan Leksmono, S. M. (2001). Pengembangan Kepariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Pariwisata*, 6.
- Hasan. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia.
- Martono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Raya Grafindo Persada.
- Muryani. (2008). *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. CV Pustaka Setia.
- Moleiong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (revisi, cet. 38 ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nastia. (2014). Implementasi Perda No. 02 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau (Studi Penggunaan Lahan Dalam Pengembangan Wilayah). *Journal of Government and Public Policy*, 1.
- Nugroho, R. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*. Pustaka Belajar.

- Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pusaran Krisis Global*. (2010). Denpasar: Universitas Udayana Press.
- Pratama, Ri. (2013). Nilai, Inovasi Pelayanan Publik (Studi Deskriptif Tentang Di, Tambah (Value Added) Inovasi Pelayanan Perizinan Bagi Masyarakat Kediri), Kota. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, 1*.
- Priasukmana, S., & Mulyadin, M. (2001). Pengembangan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah. *Info Sosial Ekonomi, 2*, 37–44.
- Sirajuddin, I. A. (2014). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik, 4*.
- Soetarso Priasukmana, R. R. (2001). Pembangunan Desa Wisata: Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah. *Info Sosial Ekonomi, 2*, 37-44.
- Subiiianto. (2012). *Kebijakan Publik*. Brilliant.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. (C. P. Dede Mariana, Ed.) Bandung: AIPI.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Mandarmaju.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang
Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah